



TJANDRA ARTHA

PT BPR Tjandra Artha Lestari

MIJTRA BISNIS YANG AMAN DAN TERPERCAYA

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI

TAHUN 2022

BAB I

PENJELASAN UMUM

POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pasal 2 ayat (1) *BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi* menjadi dasar bagi BPR Tjandra Artha Lestari menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya agar :

- Dapat mendukung pengelolaan BPR secara efektif dan efisien,
- Menjamin kesehatan bank dan melindungi pemegang saham, dan Stakeholders bahwa pengurusan dan pengawasan BPR Tjandra Artha Lestari dijalankan secara profesional.

Penerapan Tata Kelola di BPR Tjandra Artha Lestari diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- Penangan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
- Penerapan Manajemen Resiko, termasuk sistem pengendalian intern
- Batas maksimum pemberian kredit
- Rencana bisnis BPR
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Berikut Laporan Tata Kelola BPR Tjandra Artha Lestari posisi 31 Desember 2022.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Susan Riana
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas pengelolaan BPR secara Profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Merealisasikan pencapaian target BPR sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan BPR. Memastikan kecukupan Sumber Daya Manusia dalam dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja accounting, operasional dan kegiatan penunjang operasional; menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit intern, Manajemen Resiko dan Kepatuhan. Menetapkan job desk setiap karyawan. Menindaklanjuti temuan audit. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 		
2.	Nama	:	Oktonus
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab atas pengelolaan BPR secara Profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Membantu Direktur Utama dalam merealisasikan pencapaian target BPR sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan BPR. Menindaklanjuti hasil temuan audit. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 		

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi dari Komisaris sudah dilakukan Direksi untuk dapat merealisasikan pencapaian target BPR sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. 2. Direksi telah memastikan kecukupan sumber daya manusia sesuai dengan rekomendasi Komisaris. 	
Penjelasan lebih lanjut :	
Nihil	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Alesius Bunawan
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Memberi nasihat kepada Direksi. 3. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha BPR. 4. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, mengevaluasi kebijakan strategis BPR. 5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit. 6. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait. 7. Memberitahukan kepada OJK jika ada pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 		
	Rekomendasi kepada Direksi :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Direksi lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur baru mengingat kondisi ekonomi yang masih belum stabil. 2. Terkait SDM yang kosong, agar segera dicarikan pengganti untuk mengisi jabatan tersebut. 		
	Penjelasan lebih lanjut :		
	Nihil		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Jika Ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan tanggung jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Resiko
	Tugas dan tanggung jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan tanggung jawab :
	Tidak ada
Tindak lanjut rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite :	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Resiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tidak lanjut rekomendasi struktur, keanggotaan, keahlian, dan indenpendensi anggota komite			Nihil			

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Resiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan lebih lanjut :			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Susan Riana	Rp 0,00	0 %
2.	Oktonus	Rp 0,00	0 %
Penjelasan lebih lanjut :			
Anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR Tjandra Artha Lestari.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Susan Riana	-	-	0%
2.	Oktonus	-	-	0%
Penjelasan lebih lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham di Perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Susan Riana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Oktonus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut :				
Anggota Direksi BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama Anggota Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham di BPR Tjandra Artha Lestari.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Susan Riana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Oktonus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut :				
Anggota Direksi BPR Tjandra Artha Lestari tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham di BPR Tjandra Artha Lestari.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp.)	Presenase Kepemilikan (%)
1.	Alesius Bunawan	Rp. 4.034.000.000,00	57.63 %
Penjelasan lebih lanjut :			
Komisaris adalah pemegang saham pengendali di BPR Tjandra Artha Lestari.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Presentase Kepemilikan (%)
1.	Alesius Bunawan		- PT. Cahaya Mitra Sarana - PT. Sekawan Chandra Abadi	32.50 % 16.67 %
Penjelasan lebih lanjut :				
Komisaris BPR Tjandra Artha Lestari memiliki saham di PT. Cahaya Mitra Sarana dan PT. Sekawan Chandra Abadi.				

E. Hubungan Keuangan dan/ Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Alesius Bunawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut :				
Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham di BPR Tjandra Artha Lestari.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Alesius Bunawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut :				
Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan Pemegang Saham di BPR Tjandra Artha Lestari.				

F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp.)
1.	Gaji	2	Rp. 337.934.296	1	Rp. 55.440.000
2.	Tunjangan	2	Rp. 49.115.114	1	-
3.	Tantiem	0	Rp.0	0	Rp.0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp.0	0	Rp.0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp.0	0	Rp.0
Total			Rp. 387.049.410		Rp. 55.440.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.00 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.84 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi yang Tertinggi (a) dan Gaji Anggota Dewan Komisaris yang Tertinggi (b)	1.90 : 1
Rasio Gaji Anggota Direksi yang Tertinggi (a) dan Gaji Pegawai yang Tertinggi (b)	2.37 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah 2 : 1	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10 Mei 2022	3	Jaminan hapus buku
2.	24 Juni 2022	3	Pertumbuhan kredit
3.	7 September 2022	3	Target laba dan kredit
Penjelasan lebih lanjut pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
*Tanggal 10 Mei 2022 dibahas tentang jaminan hapus buku, AYDA dan laba sampai dengan bulan April 2022.			
*Tanggal 24 Juni 2022 dibahas tentang pertumbuhan kredit.			
*Tanggal 7 September 2022 dibahas tentang target laba per bulan, kredit sindikasi, dan target yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Alesius Bunawan	3	-	100%
Penjelasan lebih lanjut :				
Komisaris hadir disemua rapat secara fisik.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal* (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang dilakukan oleh :							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Penjelasan lebih lanjut :								
Tidak ada Fraud pada tahun 2022.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0
Penjelasan lebih lanjut :		
Kasus hukum Perdata = 1 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan hasil <i>Niet Onvankelijverklaard</i> (gugatan penggugat tidak diterima).		

K. Transaksi ang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan lebih lanjut :							
Nihil							

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan Sosial/Politik	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp.)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

- Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- jumlah anggota Direksi minimal dua orang dan salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. BPR Tjandra Artha Lestari telah memiliki dua orang anggota Direksi tetapi belum ada yang membawahi fungsi Kepatuhan.

- Direksi bertempat tinggal di Bandar Lampung.
 - Direksi telah lulus fit and proper test dan telah diangkat melalui RUPS.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.46)
 - Berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit dua orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. BPR Tjandra Artha Lestari saat ini hanya memiliki satu orang Komisaris yang juga merupakan pemegang saham pengendali.
 - Komisaris bertempat tinggal di Bandar Lampung.
 - Komisaris tidak merangkap jabatan di BPR/BPRS atau Bank umum lainnya.
 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)
 Karena modal inti BPR Tjandra Artha Lestari di bawah Rp. 50.000.000.000,- maka tidak membentuk komite.
 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.60)
 Dalam mengambil keputusan Direksi BPR Tjandra Artha Lestari mencegah terjadinya benturan kepentingan.
 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.39)
 BPR Tjandra Artha Lestari belum memiliki Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan tetapi telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk memastikan penerapan prosedur kepatuhan dilaksanakan di setiap kegiatan BPR Tjandra Artha Lestari.
 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.20)
 BPR Tjandra Artha Lestari telah menunjuk satu orang sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern untuk melakukan fungsi pengawasan BPR dan memberikan laporan langsung ke Direktur Utama.
 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)
 Laporan keuangan BPR Tjandra Artha Lestari per 31 Desember 2022 sedang dalam proses audit KAP oleh Drs. Henry & Sugeng.
 8. Penerapan Manajemen Resiko termasuk Sisem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.40)
 BPR Tjandra Artha Lestari telah menunjuk satu orang sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko untuk memastikan penerapan Manajemen Resiko dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan, kebijakan dan kompleksitas usaha BPR. PE Manajemen Resiko merangkap PE Kepatuhan.
 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.70)
 BPR Tjandra Artha Lestari menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Sepanjang tahun 2022, BPR Tjandra Artha Lestari tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana ke pihak terkait.
 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)
 - Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi sesuai dengan visi dan misi BPR Tjandra Artha Lestari.
 - Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Komisaris dan disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan.

11. Transaksi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.20)

- BPR Tjandra Artha Lestari telah menerapkan transparansi keuangan dan non keuangan.
- BPR Tjandra Artha Lestari telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- BPR Tjandra Artha Lestari telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk atau layanan di brosur, mading pada banking hall, website dan disampaikan langsung ke nasabah atau debitur.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh indikator penilaian Tata Kelola disimpulkan sebagai berikut :

Hasil Assesment Tata Kelola PT. BPR Tjandra Artha Lestari untuk tahun pelaporan per 31 Desember 2022 berupa Nilai Komposit = 2,4 dengan Peringkat Komposit = 2 (BAIK).

BPR Tjandra Artha Lestari telah menjalankan penerapan Tata Kelola dalam semua kegiatan usaha dengan semaksimal mungkin. Terdapat kekurangan pada susunan kepengurusan berupa belum adanya Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Komisaris Independen tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan kegiatan BPR.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tjandra Artha Lestari tahun 2022 disusun sebagai gambaran yang komperhensif dalam pelaksanaan Tata Kelola di BPR Tjandra Artha Lestari.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023

Menyetujui,


Susan Riana
Direktur Utama

 
Alesius Bunawan
Komisaris